

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja operasionalnya secara transparan guna memberikan informasi yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan (Febiana & Nurcahyono, 2024). Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat sebagai respon terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi keuangan yang dapat dipercaya. Pemangku kepentingan kini tidak hanya mengandalkan kinerja keuangan, tetapi juga menilai kualitas serta keakuratan informasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang *valid* dan bebas dari manipulasi (Putri *et al.*, 2024). Oleh karena itu, integritas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam mencerminkan transparansi dan keandalan informasi perusahaan, memastikan bahwa data yang disajikan benar, akurat, jujur, dan tidak bias sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat (Anggita *et al.*, 2022).

Integritas laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyajian informasi keuangan, tetapi juga memiliki dampak luas dalam dunia bisnis. Laporan keuangan yang memiliki tingkat integritas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperlancar akses terhadap pendanaan, serta menciptakan reputasi positif yang berkelanjutan (Anggraeni *et al.*,

2020). Laporan keuangan yang memiliki tingkat integritas yang tinggi harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku (Putra *et al.*, 2022).

Penerapan standar akuntansi menjadi elemen fundamental dalam memastikan laporan keuangan disusun secara andal dan mencerminkan integritas yang tinggi. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjadi pedoman utama dalam pelaporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas informasi keuangan (Putra *et al.*, 2022). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan, serta ketentuan minimal atas isi laporan keuangan. Standar ini bertujuan agar perusahaan mampu menyusun laporan yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan integritas dan transparansi atas kondisi keuangan yang sebenarnya. Pembaruan PSAK ini juga merupakan respon terhadap kebutuhan akan pelaporan yang lebih relevan dan mampu mencerminkan kondisi ekonomi secara wajar (Nurhalizah, 2023).

Selain didukung oleh regulasi, integritas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh karakteristik utama yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, keterpahaman, serta bebas dari bias (Putra *et al.*, 2022). Karakteristik ini menjadi landasan penting bagi pengguna laporan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, karena informasi yang disajikan secara netral dan dapat diverifikasi mengurangi risiko bias atau manipulasi manajemen (Febiana & Nurcahyono, 2024).

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, masih banyak perusahaan yang melanggar integritas laporan keuangan, skandal akuntansi merupakan bentuk pelanggaran serius dalam dunia bisnis yang dapat terjadi akibat adanya manipulasi laporan keuangan oleh pihak internal perusahaan. Bentuk manipulasi yang umum dilakukan antara lain melebihkan pendapatan, mengecilkan biaya, menyembunyikan kewajiban (*liabilities*), serta melebih-lebihkan nilai aset perusahaan. Seperti yang terjadi dalam kasus WorldCom di Amerika Serikat pada tahun 2002, perusahaan ini secara sengaja mengkapitalisasi biaya operasional yang seharusnya dicatat sebagai beban periode berjalan, sehingga laba bersih perusahaan tampak jauh lebih tinggi daripada kenyataan. Praktik ini bertujuan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang tampak stabil, menarik lebih banyak investor, dan menjaga harga saham tetap tinggi. Akibat manipulasi ini, WorldCom akhirnya mengajukan kebangkrutan, menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan mengguncang pasar keuangan global (Sagala & Jumiadi, 2020). berikut ini adalah beberapa daftar perusahaan global yang melakukan manipulasi laporan keuangan:

Tabel 1.1.
Daftar Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan Global

Nama perusahaan	Jenis manipulasi	Dampak
Thoshiba Corporation Sumber: (Fikri & Suryani, 2020)	Memalsukan pembukuan sebesar 150 miliar yen untuk meningkatkan pendapatan secara fiktif	Merusak reputasi global Toshiba, menurunkan kepercayaan investor
Enron Corporation Sumber: (Manuari & Devi, 2021)	Menyembunyikan utang perusahaan melalui entitas khusus (SPV), memalsukan laba hingga US\$ 600 juta	Perusahaan bangkrut; salah satu skandal terbesar dalam sejarah bisnis global

Nama perusahaan	Jenis manipulasi	Dampak
WorldCom Sumber: (Sagala & Jumiadi, 2020)	Mengklasifikasikan biaya operasional sebagai investasi modal; manipulasi laba sebesar US\$ 2 miliar	Skandal menyebabkan kebangkrutan, pemecatan CEO, dan perubahan besar pada regulasi akuntansi
Global Crossing Sumber: (Manuari & Devi, 2021)	Menggelembungkan pendapatan dengan transaksi tidak nyata (swap kapasitas jaringan)	Perusahaan bangkrut; kerugian besar bagi investor
Tyco International Sumber: (Manuari & Devi, 2021)	Manipulasi laporan keuangan oleh eksekutif, penyalahgunaan aset perusahaan	Penjara bagi eksekutif utama; kerugian besar investor
Bank of Credit and Commerce International (BCCI) Sumber: (Putra <i>et al.</i> , 2022)	Menyalurkan kredit ilegal, menyembunyikan kerugian, manipulasi akun nasabah	Skandal senilai US\$ 4 miliar; salah satu kasus pencucian uang terbesar dunia

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Di Indonesia, berbagai kasus telah menunjukkan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, Dalam kumpulan berita yang telah dirangkum Sandria, (2020) beberapa kasus terkait dugaan dan manipulasi laporan keuangan emiten di pasar modal di Indonesia antara lain kasus PT KAI (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Hanson International Tbk, dan PT Envy Technologies Indonesia Tbk.

Kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menjadi salah satu kasus signifikan dalam sejarah pasar modal Indonesia. AISA terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2017, yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan di tengah kondisi keuangan yang memburuk. Berdasarkan hasil investigasi auditor independen Ernst & Young Indonesia, ditemukan bahwa manajemen melakukan penggelembungan nilai

piutang usaha, persediaan, aset tetap, pendapatan, dan EBITDA, dengan total *overstatement* mencapai lebih dari Rp 4 triliun (Wareza, 2019).

Manipulasi ini menyebabkan laporan keuangan menampilkan citra keuangan yang sehat, termasuk nilai buku per saham sebesar Rp 1.300-Rp 1.500, padahal secara fundamental perusahaan mengalami defisit ekuitas. Informasi yang menyesatkan ini mendorong investor untuk membeli saham AISA dengan asumsi bahwa saham tersebut *undervalued*. Padahal, kenyataan keuangannya jauh dari kondisi yang dilaporkan. Akibatnya, ketika manipulasi terungkap, harga saham anjlok dan perdagangan saham AISA disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia pada Juli 2018, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi investor (Zulfikar, 2021).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun standar akuntansi seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, praktik manipulasi masih terus terjadi. Perusahaan yang memiliki tekanan finansial tinggi, seperti perusahaan dengan tingkat *leverage* yang besar, sering kali menghadapi insentif lebih kuat untuk melakukan manajemen laba guna mempertahankan stabilitas keuangan mereka (Anggraeni *et al.*, 2020). Hal ini membuat perusahaan juga dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif. Mekanisme tata kelola perusahaan seperti keberadaan komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit bertujuan untuk dapat mengurangi asimetri informasi dan mencegah manajemen melakukan praktik oportunistik yang dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan (Febiana & Nurcahyono, 2024).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di antaranya adalah komite audit, komisaris independen, dan *leverage*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dirancang untuk mengurangi konflik keagenan dengan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi (Fikri & Suryani, 2020).

Dalam penelitian oleh Fitriyaningsih *et al.*, (2024) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, di mana perusahaan dengan mekanisme pengawasan yang lebih kuat cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dan bebas dari manipulasi. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Anggraeni *et al.*, (2020) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, terutama dalam meminimalkan risiko kecurangan pelaporan. Selain itu studi oleh Istutik *et al.*, (2022) menunjukkan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, menegaskan peran penting komite audit dalam mencegah manipulasi informasi.

Di sisi lain, hasil berbeda di tunjukkan oleh penelitian Anggita *et al.*, (2022) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Manuari & Devi, (2021) yang

menyatakan bahwa keberadaan komite audit tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dalam teori agensi, komisaris independen membantu mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajemen dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan (Anggita *et al.*, 2022).

Penelitian oleh Abbas *et al.*, (2021) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, menandakan bahwa keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan transparansi dan kejujuran informasi keuangan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sucitra *et al.*, (2020) bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan pada integritas laporan keuangan. Penelitian oleh Anggraeni *et al.*, (2020) turut menegaskan bahwa peran komisaris independen secara signifikan berdampak pada peningkatan integritas laporan keuangan.

Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhalizah *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu berperana secara efektif dalam mencegah terjadinya praktik manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Hasil serupa ditemukan oleh Fikri dan Suryani, (2020) yang menemukan bahwa

komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Manuari & Devi, (2021) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, yang menyebabkan komisaris independen cenderung berpihak pada kepentingan pemegang saham mayoritas dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi independensi komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.

Leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, dan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap dana eksternal dalam menjalankan operasionalnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai struktur pendanaan perusahaan dan tingkat risiko keuangannya (Wahyuni, 2022). Dalam teori agensi, *leverage* yang tinggi juga dapat menciptakan tekanan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik daripada kenyataan sebenarnya (Anggita *et al.*, 2022).

Dalam penelitian Febiana & Nurcahyono, (2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Ini mendukung hasil penelitian oleh Suzan & Wulan, (2022) juga menemukan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Isyнуwardhana, (2021) juga menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan bahwa dengan

nilai *leverage* yang tinggi menandakan perusahaan menghasilkan nilai integritas yang rendah.

Sementara itu, penelitian penelitian yang dilakukan oleh Istutik *et al.*, (2022) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tingkat rasio *leverage*, baik tinggi maupun rendah, tidak selalu mencerminkan tingkat integritas pelaporan keuangan. Kemungkinan kreditur telah memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai kondisi perusahaan, sehingga tetap memberikan kepercayaan meskipun perusahaan memiliki rasio *leverage* yang rendah. Dengan demikian, rendahnya *leverage* tidak selalu menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan memiliki tingkat integritas yang rendah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Anggraeni *et al.*, (2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, komisaris independen, dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sub sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, khususnya peran komite audit dan komisaris independen, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, *leverage* sebagai faktor eksternal dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yang berpotensi menurunkan integritas laporan keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan *Leverage* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor *Consumer non-cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024”**.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan berharga pada kemajuan teori akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan konsep konservatisme dan implikasinya terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya mengenai pengembangan dan kemajuan pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan komite audit, komisar independen, *leverage*, dan dampaknya terhadap integritas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada mengenai integritas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan fokus khusus pada dampaknya terhadap perusahaan sub sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para investor dan calon investor, yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan.